



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 620 - 351 TAHUN 2016

TENTANG

STATUS RUAS JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Peta Jaringan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruas Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 28 Maret 2016



Dr. TGH. M. Zainul Majdi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016

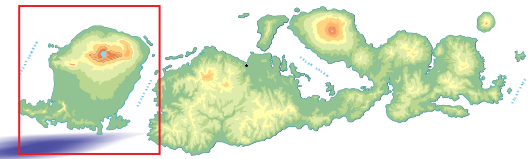
TENTANG : STATUS RUAS JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NOMOR RUAS				N A M A R U A S	PANJANG (KM)
	LAMA		BARU			
1			050	11.K	Jln. Terminal Mandalika (Bertais - Sweta)	1,70
2	047	11.K	051	11.K	Jln. DR. Sutomo/Mataram - Rembiga	2,39
3	048	1	052		Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang	21,64
4	048	11.K	052	11.K	Jln. DR. Wahidin (Bts. Kota)	0,70
5	053	11.K	053	11.K	Jln. Yos Sudarso	0,85
6	053	12.K	053	12.K	Jln. Langko	2,30
7	054	11.K	054	11.K	Jln. Pejanggik	3,15
8	055	11.K	055	11.K	Jln. Selaparang	2,25
9	056.	11.K	056	11.K	Jln. Udayana/Junction - Selaparang	1,95
10	057	11.K	057	11.K	Jln. Erlangga	1,58
11	058	11.K	058	11.K	Jln. Gajah Mada	3,55
12	059	11.K	059	11.K	Jln. W R. Supratman	0,65
13	059	12.K	059	12.K	Jln. A. Rahman Hakim	1,14
14	060	11.K	060	11.K	Jln. R A. Kartini	1,05
15	061	11.K	061	11.K	Jln. Ade Irma Suryani	3,00
16	062	11.K	062	11.K	Jln. Bung Hatta	2,90
17	063	11.K	063	11.K	Jln. Bung Karno	4,35
18	064	11.K	064	11.K	Jln. AA. Gede Ngurah	0,85
19	065	11.K	065	11.K	Jln. Prabu Rangka Sari	2,00
20	066	11.K	066	11.K	Jln. Sultan Hasanudin	0,65
21	067	11.K	067	11.K	Jln. Imam Bonjol	1,00
22	068	11.K	068	11.K	Jln. Diponegoro (Bts. Kota)	0,72
23	069	11.K	069	11.K	Jln. Majapahit	3,05
24	070	11.K	070	11.K	Jln. Sriwijaya	3,13
25	071	11.K	071	11.K	Jln. Brawijaya	1,93
26	072	11.K	072	11.K	Jln. R. Suprpto	0,75
27	072	12.K	072	12.K	Jln. Panji Tilar Negara	1,91
28	073	11.K	073	11.K	Jln. Pendidikan	1,57
29	074	11.K	074	11.K	Jln. Caturwarga	1,90
30	075	11.K	075	11.K	Jln. Panca Usaha	1,35
31	076	11.K	076	11.K	Jln. Tumpangsari	1,20
32	077	11.K	077	11.K	Jln. Sultan Salahudin	1,10
33	077	12.K	077	12.K	Jln. Sultan Kaharudin	1,85
34	078	11.K	078	11.K	Jln. TGH. Bangkol	1,72
35	079	11.K	079	11.K	Jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa	1,70
36	080		080		Bengkel - Kediri	2,56
37	081		081		Kediri - Rumah	3,00
38	082		082		Kediri - Praya	14,46
39	082	11.K	082	11.K	Jln. Gajah Mada	2,95
40	083		083		Praya - Kruak	21,50
41	084		084		Kruak - Lb. Haji	15,05
42	085		085		Tanjung Geres - Pohgading - Pringgabaya	15,23
43			086	1	Mapak - Perampuan	0,80
44			086	2	Perampuan - Kebun Ayu - Lembar	14,68
45	087		087		Lembar - Sekotong - Pelangan	41,00
46	088		088		Pelangan - Sp. Pengantap	36,38
47	089		089		Pengantap - Mt.Ajan - Kuta	36,44
48	090		090		Kuta - Kruak	37,95
49	091		091		Kruak - Pancor	22,77
50	092	2	092		Masbagik - Pancor	6,30
51	092	11.K	092	11.K	Jln. TGH Zainudin Abd. Majid (Pancor - Selong)	3,45
52	092	13.K	092	12.K	Jln. Cokroaminoto	1,92
53	093		093		Selong - Lb. Haji	5,45
54	098	1	094		Pancor - Rempung	4,41
55			095		Kediri - Kuripan	5,30

LAMPIRAN I.B

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

PULAU LOMBOK

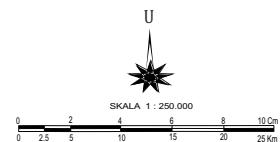
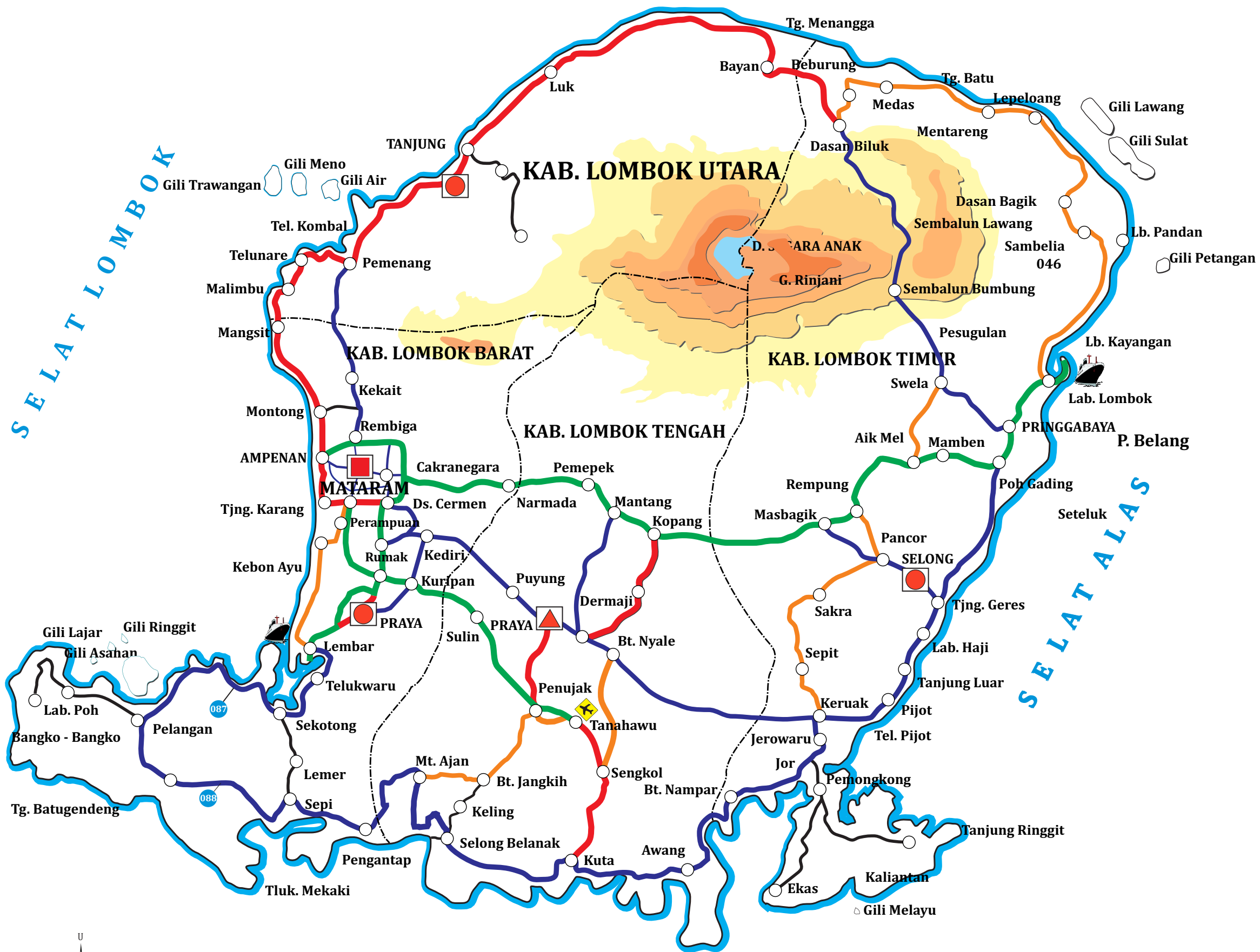


LEGENDA :

- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)

- PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
- PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
- PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)

- BANDAR UDARA
- PELABUHAN PENYEBERANGAN
- GUNUNG
- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

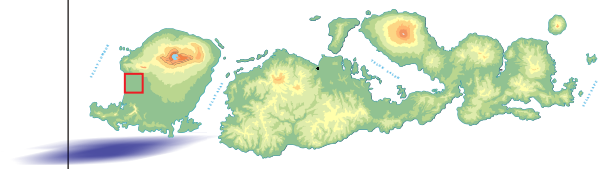
[Signature]

H.M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN II.C

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

MATARAM



LEGENDA :

- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)

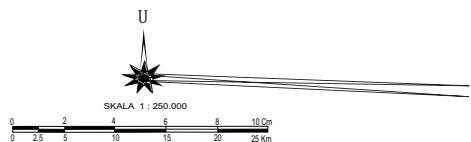
- PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
- PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
- PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)

- BANDAR UDARA
- PELABUHAN PENYEBERANGAN
- GUNUNG
- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

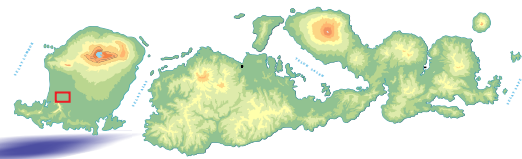
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



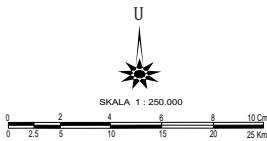
H.M. ZAINUL MAJDI



GERUNG



- LEGENDA :
- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)
 - PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
 - PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
 - PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
 - PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)
 - BANDAR UDARA
 - PELABUHAN PENYEBERANGAN
 - GUNUNG
 - IBU KOTA PROVINSI
 - IBU KOTA KABUPATEN
 - KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN



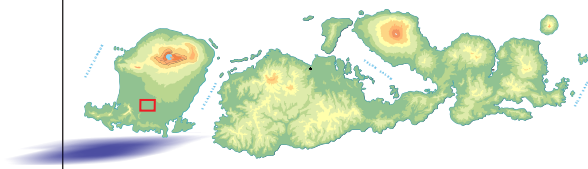
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H.M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN V.C

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

PRAYA



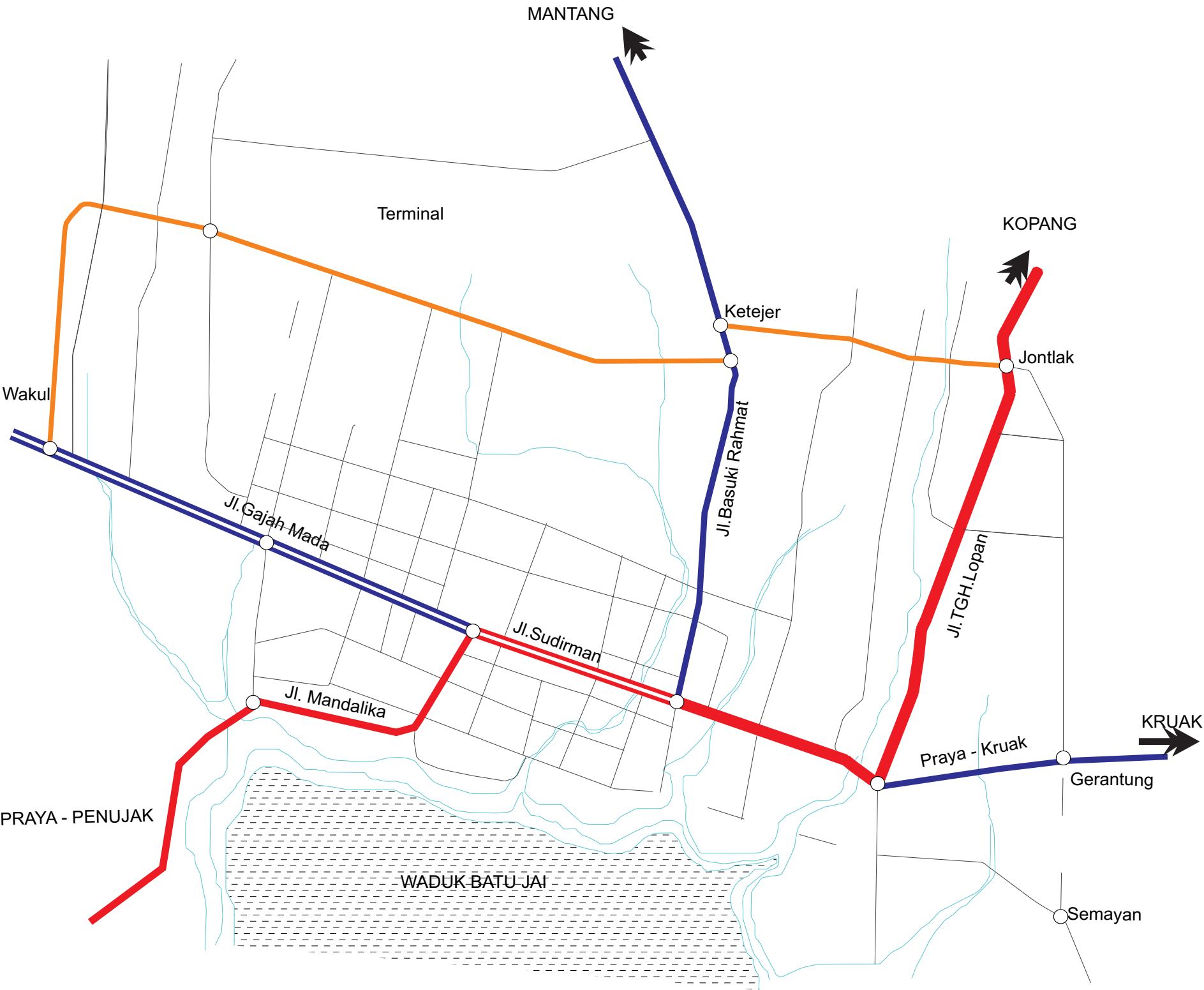
- LEGENDA :
- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)

- PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
- PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
- PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)

- BANDAR UDARA
- PELABUHAN PENYEBERANGAN
- GUNUNG
- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

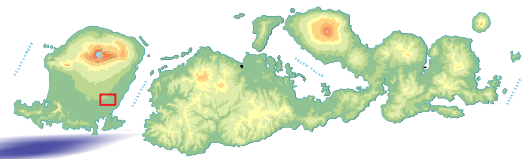
H.M. ZAINUL MAJDI



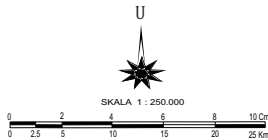
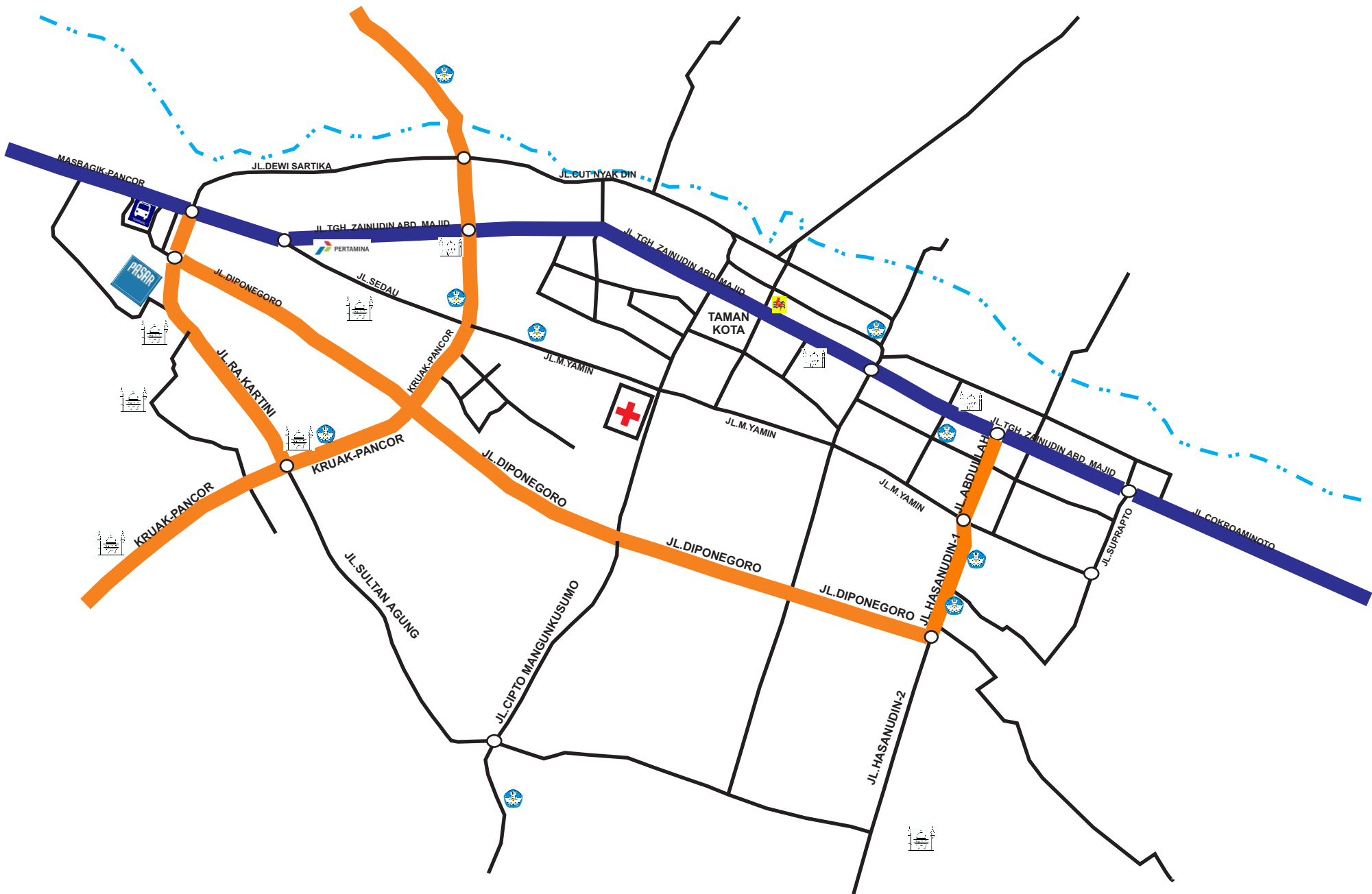
LAMPIRAN VI.C

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

SELONG



- LEGENDA :
- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)
 - PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
 - PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
 - PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
 - PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)
 - BANDAR UDARA
 - PELABUHAN PENYEBERANGAN
 - GUNUNG
 - IBU KOTA PROVINSI
 - IBU KOTA KABUPATEN
 - KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN



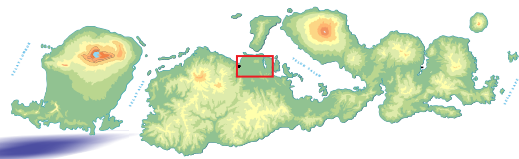
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H.M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN VIII.C

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

SUMBAWA BESAR



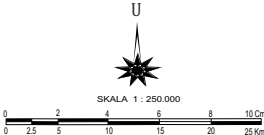
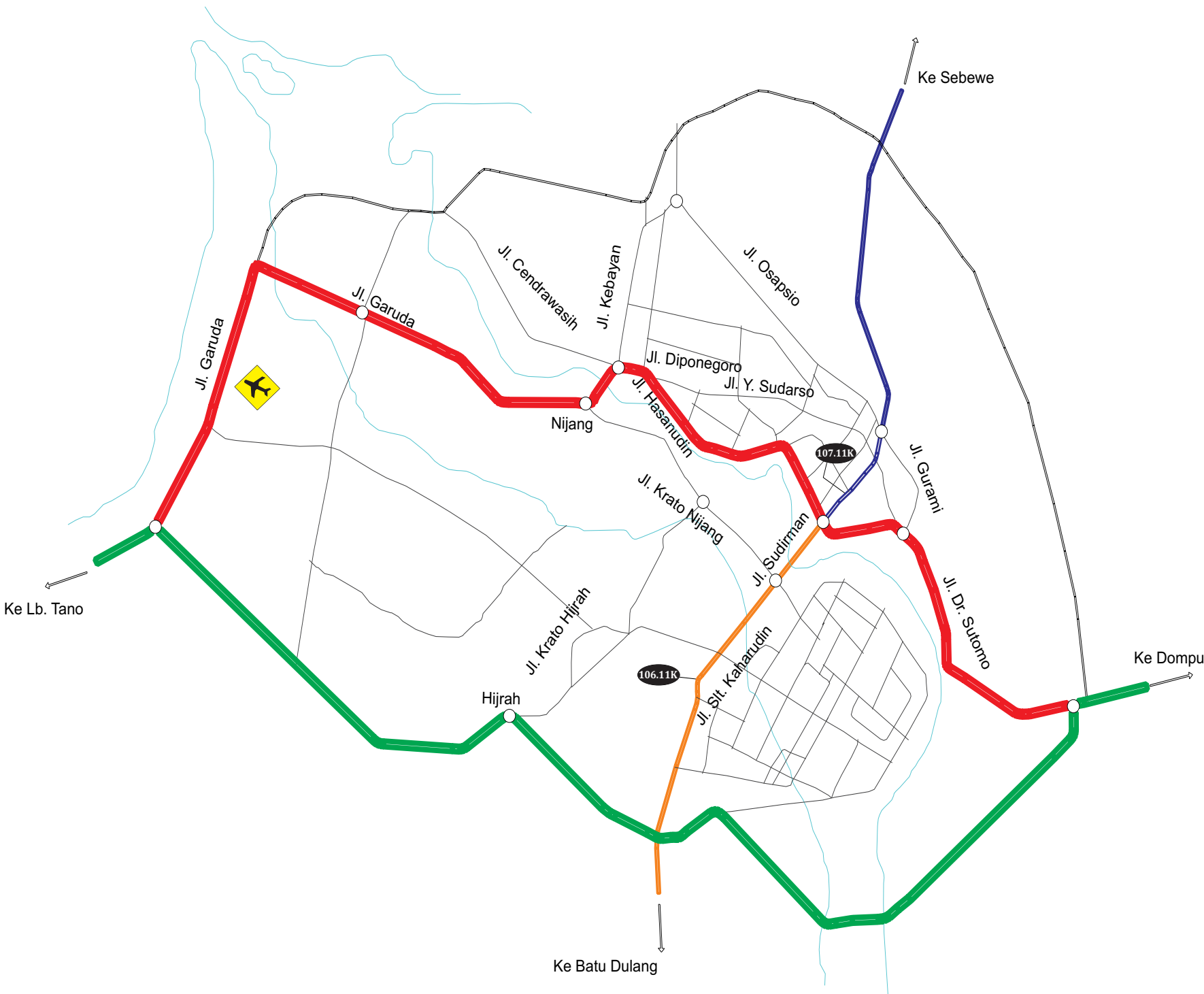
- LEGENDA :
- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)

- PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
- PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
- PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)

- BANDAR UDARA
- PELABUHAN PENYEBERANGAN
- GUNUNG
- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

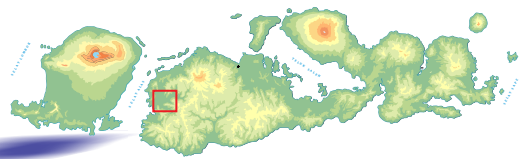
H.M. ZAINUL MAJDI



LAMPIRAN VII.C

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

TALIWANG



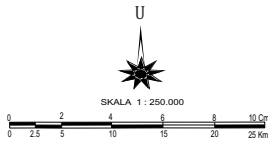
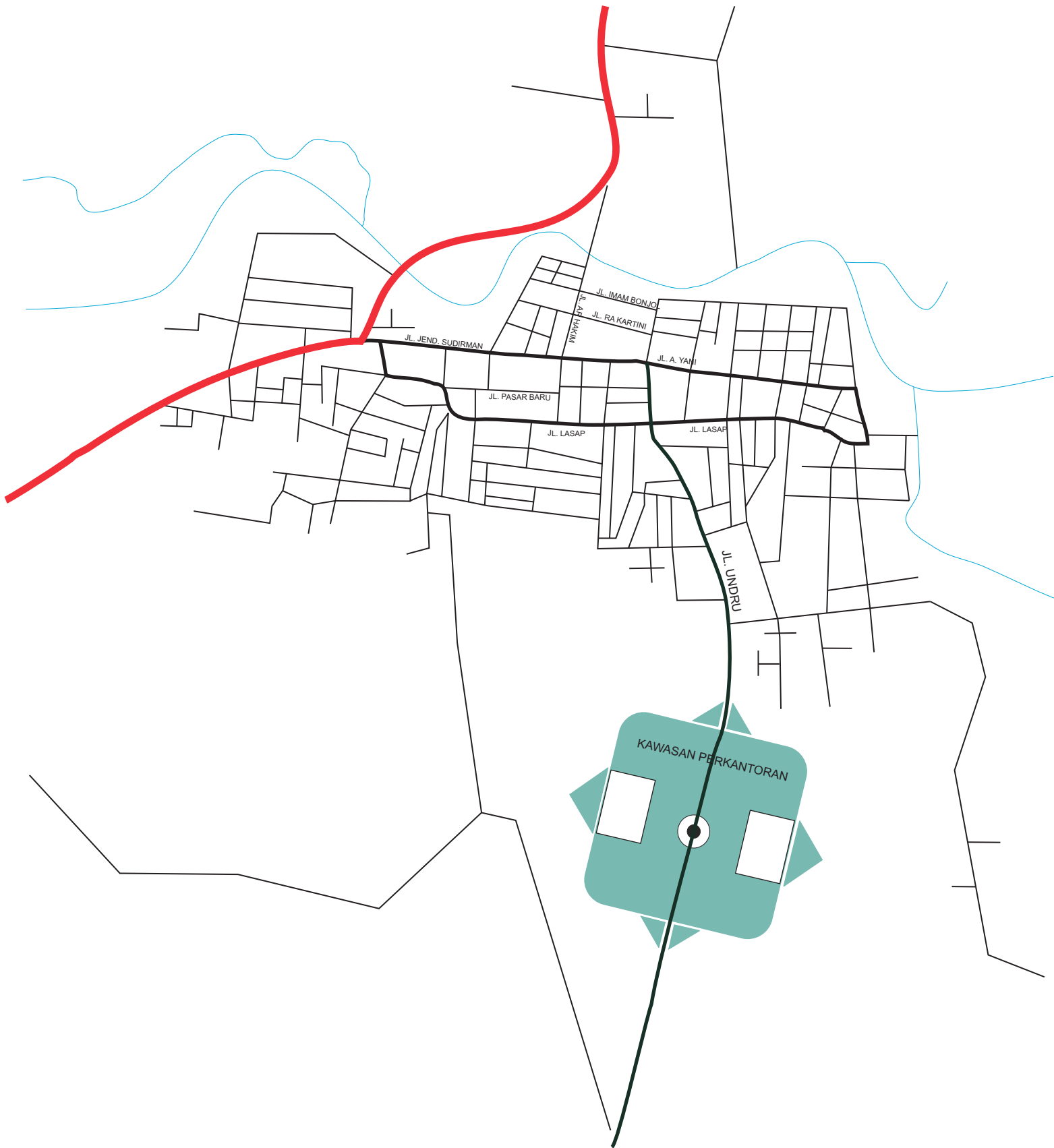
- LEGENDA :
- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)

- PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
- PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
- PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)

- BANDAR UDARA
- PELABUHAN PENYEBERANGAN
- GUNUNG
- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

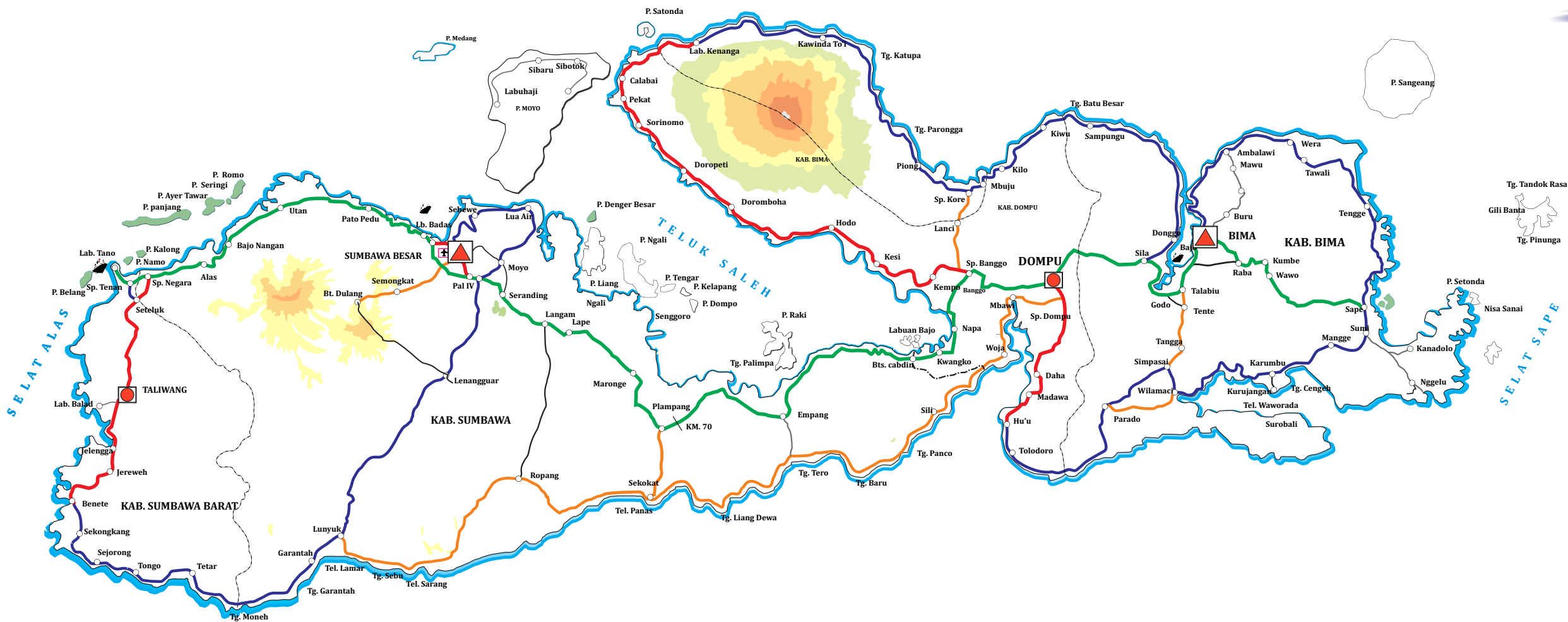
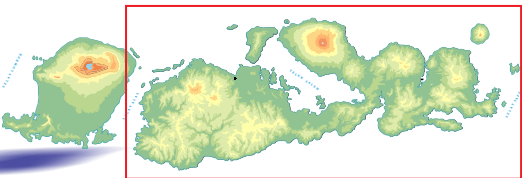

H.M. ZAINUL MAJDI



LAMPIRAN I.C

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

PULAU SUMBAWA

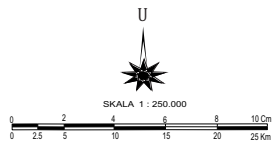


LEGENDA :

- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)

- PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
- PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
- PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)

- BANDAR UDARA
- PELABUHAN PENYEBERANGAN
- GUNUNG
- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

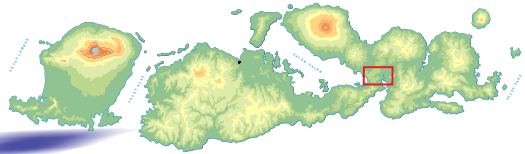


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H.M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN IX.C

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

DOMPU



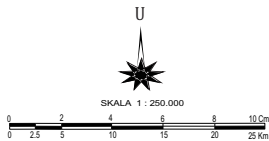
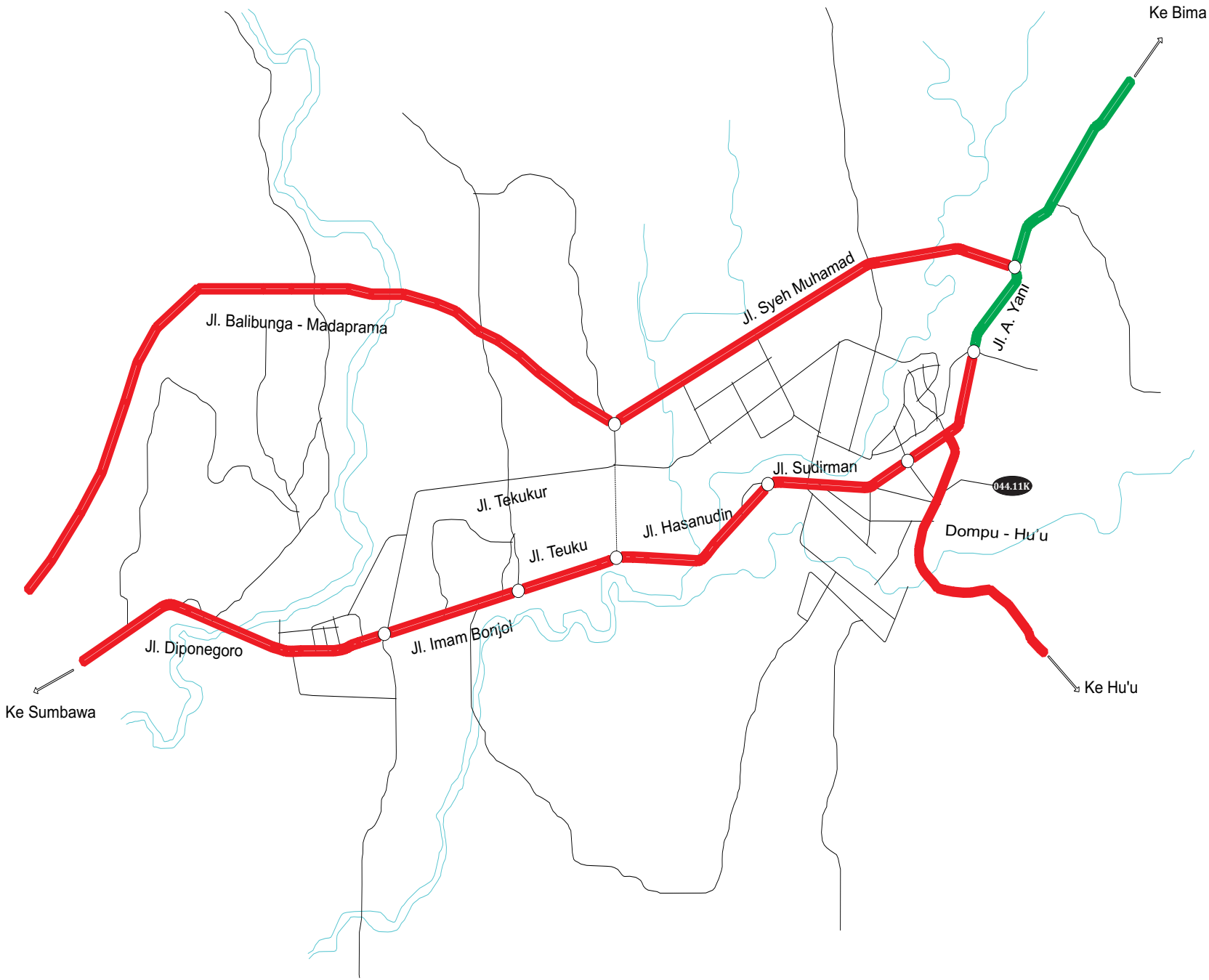
- LEGENDA :
- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)

- PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
- PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
- PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)

- BANDAR UDARA
- PELABUHAN PENYEBERANGAN
- GUNUNG
- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

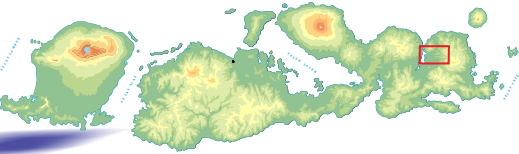
H.M. ZAINUL MAJDI



LAMPIRAN X.C

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 620 - 351 TAHUN 2016
TENTANG : RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA

B I M A



LEGENDA :

- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-2 (JKP-2)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-3 (JKP-3)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4)/
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)

- PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)
- PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)
- PUSAT KEGIATAN DIBAWAH PKL (PK-PKL)

- BANDAR UDARA
- PELABUHAN PENYEBERANGAN
- GUNUNG
- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H.M. ZAINUL MAJDI

